



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NAVIS ZIKRA
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN KEPATUHAN INTERNAL
3. NHK : 430922

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.050.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/90 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.050.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 249.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
2. MOBIL, SUZUKI XL7 Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000
3. MOBIL, CHEVROLET TRAX Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 28.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 8.000.001

F. HARTA LAINNYA Rp. 55.000.000

Sub Total Rp. 1.390.500.001

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.390.500.001

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RAMLI SIMBOLON
2. Jabatan : PELELANG AHLI MADYA KPKNL BANDUNG
3. NHK : 122603

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.100.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/200 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **268.000.000**

1. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 178.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 38.000.000
3. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000
4. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **100.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **239.792.270**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **1.707.792.270**

III. HUTANG **Rp.** **168.169.110**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **1.539.623.160**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AKHMAD ABRORI
2. Jabatan : PELELANG AHLI MADYA KPKNL BANDUNG
3. NHK : 155502

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **855.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 162 m2/110 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 370.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/36 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 485.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **641.800.000**

1. MOTOR, HONDA MEGA PRO SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000
3. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 2.300.000
4. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
5. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 13.500.000
6. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 212.000.000
7. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000



8. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
220.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 52.800.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 259.026.475

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.808.626.475

III. HUTANG Rp. 597.535.797

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.211.090.678

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.